

MULTI-PARADIGMA POLITIK DARI ZAMAN ALKITAB HINGGA MODERN

JIMMY RUNGKAT

Dosen Agama Kristen di Politeknik Amamapare Timika
(Email : jimmyrunkat@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan paradigma politik dari zaman Alkitab hingga zaman modern. Melalui metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendekatan studi kepustakaan diperoleh hasil bahwa politik selalu berbicara mengenai urusan dan kebijakan-kebijakan tertentu dalam suatu Negara dan dasar pijakan dari kebijakan-kebijakan tersebut terletak pada masyarakat. Realitas politik dalam garis sejarah mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Para pemikir politik kuno memusatkan perhatiannya kepada masalah Negara ideal, para pemikir politik abad pertengahan melibatkan diri mereka pada pengembangan suatu kerangka bagi adanya pendirian Kerajaan Allah di dunia, sedangkan para pemikir politik pada jaman sesudahnya telah melibatkan diri mereka pada masalah-masalah lainnya seperti kekuasaan, wewenang dan lain-lain; yang selanjutnya pembahasan tentang politik berfokus pada masalah kelembagaan (organisasi). Dari hal ini sangat jelas bahwa pada intinya perubahan paradigma dari pembahasan politik itu terletak pada fenomena politik yang menunjuk pada masalah-masalah sosial manusia. Pada prinsipnya, politik yang awal mulanya bertujuan untuk mengejar *phronesis*, kebijaksanaan praktis agar warga hidup baik sesuai tujuan Negara, mengalami pergeseran di mana politik dipisahkan secara radikal dari urusan etika dan hukum, yang akhirnya menyerahkan politik beroperasi di bawah rasio instrumental dan kehilangan kaitannya dengan persoalan nilai.

Kata Kunci: Politik, Paradigma, Sejarah, Alkitab, Modern

ABSTRACT

This study examines the development and transformation of political paradigms from biblical times to the modern era. Employing a qualitative descriptive methodology grounded in a literature review, the study demonstrates that politics has consistently concerned the formulation and administration of public affairs and policies within the state, with society constituting the fundamental basis upon which such policies are conceived and implemented. From a historical perspective, political thought has undergone substantial paradigm shifts. Ancient political philosophers were predominantly concerned with the notion of the ideal state, whereas medieval political thinkers focused on developing a conceptual framework for the establishment of the Kingdom of God on earth. In subsequent periods, political thought expanded to encompass issues such as power, authority, and related dimensions of political life, eventually shifting its analytical focus toward institutional and organizational structures. These historical developments indicate that the fundamental transformation of political thought is closely associated with changing conceptions of political phenomena as manifestations of broader human social realities. At its origins, politics was oriented toward the pursuit of phronesis, or practical wisdom, through which citizens were expected to attain a good and virtuous life in accordance with the telos of the state. Over time, however, this conception underwent a profound transformation as politics became increasingly detached from ethical and legal considerations. This separation ultimately enabled political practice to operate predominantly according to instrumental rationality, thereby weakening its intrinsic relationship with questions of values, virtue, and the common good.

Keywords: Politics, Paradigm, History, Biblical, Modern

PENDAHULUAN

Politik telah menjadi “nafas hidup” bagi berbagai urusan sektoral manusia dewasa ini. Dengan politik, semua hal memiliki pintu kesuksesan. Namun tanpa memahami makna politik yang sesungguhnya dan sejarah perkembangan pemikiran politik, menjadi “Bagai kerbau dicocok hidung.”

Istilah politik berasal dari kata Yunani *polis* yang secara harfiah berarti Negara kota (city state). Pada jaman Yunani kuno, politik berkisar pada urusan pemerintahan Negara yang sifatnya masih sangat sederhana (kota), sehingga sistem pemerintahan menyentuh segala aspek seperti Negara, kota, dan masyarakat (Pringgodigdo, 1977:896).

Pemahaman yang menyeluruh dari arti harfiah kata politik dirumuskan oleh Tom. B. Jones, yang dikutip oleh Saut Sirait (2006:22), bahwa *Polis ... Greek word for city, also extended to mean the state. It is the source of the English words, "politics," "politician" and allied terms. In Greece, the polis, or city state, a political entity composed of an urban area and its surrounding countryside, was the normal, and also ideal, autonomous political division.*

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, politik berarti ilmu mengenai sistem pemerintahan (dasar-dasar pemerintahan) atau mengenai urusan dan kebijakan-kebijakan tertentu dalam suatu Negara (Poerwadarminta, 1985:763). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik satu tema utama dari istilah politik yakni mengenai sistem pemerintahan.

Pada perkembangan selanjutnya istilah politik mengalami arti yang meluas. Para ahli membagi makna politik ke dalam dua dimensi, yakni politik sebagai ilmu (political science) dan politik sebagai filsafat (political philosophy). Namun walaupun kedua dimensi politik itu mempunyai pengertian yang berbeda, tetapi pada dasarnya bagian-bagian tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berangkat dari sistem pemerintahan.

Politik sebagai ilmu di dasarkan pada proses dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan American Political Science Association, yang dikutip oleh The Liang Gie (1986:58), bahwa *political science has its own areas of human experience to analyze, its own body of descriptive and factual data to gather, its own conceptual schemes to formulate and test for truth.*

Miriam Budiardjo (2005:8) menambahkan bahwa politik sebagai ilmu berbicara tentang pengambilan keputusan (decisionmaking) demi melahirkan tujuan-tujuan dari sistem pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber yang ada, dan untuk melaksanakan semua itu diperlukan faktor kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat direalisasikan dengan cara persuasi atau paksaan. William Ebenstein (dalam Sirait, 2006:23) menyimpulkan bahwa politik sebagai ilmu merupakan *systematic analisis of*

government, its processes, forms of organization, institutions and purposes.

Di sisi lain, politik sebagai filsafat menyangkut alat kontrol dalam sebuah sistem pemerintahan yang mengacu pada persoalan fundamental, hakikat dan tujuan-tujuan ideal Negara, fungsi yang benar dari pemerintah, dan batas-batas kekuasaannya yang tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap keluarga, lembaga-lembaga keagamaan dan institusi lainnya (Sirait, 2006:23). Dalam hal ini menurut Karl Deutch (dalam Sirait, 2006:24) yang menjadi alat kontrol tunggal atau alamat pembahasan politik sebagai filsafat dari sistem pemerintahan adalah masyarakat (manusia pada umumnya); *politics is the making of decision by public means.*

Hal serupa ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno (1994:19-20) bahwa politik sebagai filsafat memiliki kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dia melanjutkan bahwa suatu keputusan, kebijakan, dan tindakan itu bersifat politis dalam suatu pemerintahan apabila diambil atau di dasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas, maka politik memberikan pengertian bahwa masyarakat (khususnya berbagai individu) merupakan sumber, dasar, wahana, dan tujuan pembuatan semua keputusan dalam sebuah Negara dan pemerintahan.

Latar belakang tersebut menjadi dasar tujuan penelitian ini, yakni untuk memahami perkembangan paradigma politik dari zaman Alkitab hingga zaman modern.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), sebuah pendekatan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Penelitian ini menyelidiki literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan karena pengumpulan data tentang paradigma politik dalam sejarah pemikiran di dunia hanya dapat dicapai melalui penelitian pustaka dan tidak dapat dicapai melalui penelitian lapangan (Rungkat, 2022:24).

Di samping itu, Peneliti menggunakan metode penelitian hermeneutik, khususnya pendekatan eksegesis-teologis, untuk

mencapai pemahaman yang menyeluruh dan mendasar. Penulis menggunakan hermeneutik Alkitabiah sebagai bagian dari penelitian mereka. Hermeneutik Alkitabiah adalah bagian dari teologi ilmiah dan seni yang melibatkan penafsir sepenuhnya untuk menentukan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Tujuan pemakaian ancangan hermeneutik-eksegesis pada data adalah untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai konteks yang memberikan makna dengan menggunakan proses analisis teks dan makna teologis (Rungkat, 2025:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Paradigma Politik di dalam Alkitab

Pemahaman tentang politik pun dijelaskan secara menyeluruh dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Hanya saja, terdapat perbedaan yang tajam antara paradigma politik dalam ilmu sekuler dan paradigma politik dalam Alkitab. Politik dalam ilmu sekuler hanya menyentuh ruang lingkup horizontal manusia, sedangkan dalam Alkitab menyentuh baik ruang lingkup vertikal maupun horizontal. Itulah sebabnya untuk mendapatkan pemahaman tentang politik secara komprehensif, ada baiknya Alkitab dijadikan sumber observasi.

1. Paradigma Politik di Zaman Perjanjian Lama

Perjanjian Lama merupakan salah satu bagian dari sejarah keselamatan. Suatu cerita Allah (His-story) tentang pribadi dan karya-Nya kepada manusia dalam ruang dan waktu. Berbicara mengenai theologia politik dalam Perjanjian Lama selalu berhubungan erat dengan sifat religiusitas bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang monotheisme, bahkan ada yang menyebutnya sebagai monotheisme praktis (Rowley, 1983:16-17), yang mana mereka hanya menyembah kepada Allah Yahweh (Vriezen, 2001:64). Kehidupan spiritualitas bangsa Israel merupakan sesuatu yang bernilai tinggi. Tidak ada bangsa lain yang dapat menandingi ciri kultus mereka. Dalam agama Israel unsur seksualitas tidak muncul, ritus-ritus magis dengan merangsang kesuburan ditolak oleh Yahwisme, dan konsep tentang ilah yang mati dan bangkit tidak ada perannya (Vriezen, 2001:64). Sikap imanensi yang tinggi membuat kehidupan mereka semakin hari berada pada tingkat ekonomi, moral dan

politik yang memuncak. Namun ketika mereka mencoba untuk menghindari dari hal-hal kultus tersebut, maka semudah “membalikkan telapak tangan” Allah Yahweh mengubah situasi dan kondisi mereka menjadi merosot bahkan sampai mengalami krisis yang berkepanjangan. Hal yang tidak mengenakan telinga seperti ini sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dan ternyata diakibatkan oleh pengaruh politeisme bangsa-bangsa asing yang ada di sekeliling mereka.

Jika dihubungkan antara agama Israel dengan agama bangsa-bangsa asing, maka ditemukan beberapa hal yang sangat kontras. *Pertama*, Yahwisme tidak bersifat statis. Agama Israel tidak cenderung pada monisme seperti agama Mesir yang merupakan suatu kesalahpahaman besar, jika monoteisme di Israel disejajarkan dengan monarkisme yang cenderung pada panteisme seperti yang berlaku di Mesir. *Kedua*, Yahwisme tidak bersifat dualistis. Agama Israel tidak memperlihatkan dualisme seperti yang merupakan ciri khas agama Babel. Dan *ketiga*, Yahwisme tidak mendewakan alam. Di dunia Kanaani-Fenisia, pemikiran agamani bertolak dari fenomena-fenomena alamiah yang berkenaan dengan pertumbuhan. Tetapi, di Israel tidak seperti itu. Di dunia Fenisia, dewi dan dewa disebut sebagai pasangan, dewi sering dibayangkan telanjang, dan bahkan El sendiri dikatakan mempunyai dua istri (Vriezen, 2001:64-66).

Ciri-ciri umum agama bangsa-bangsa asing adalah: banyak ilah, pemujaan berhala, keselamatan diperoleh dengan usaha sendiri dan mempersembahkan kurban; yang mana tidak ada dalam budaya religi dan bahkan ditolak di Israel. Gambaran dari periode klasik agama Israel tersebut melatarbelakangi bentuk religiusitas dalam dunia politik bangsa Israel. Keadaan religius yang sedang terjadi merupakan suatu peristiwa yang ditunggangi oleh unsur politik. Seseorang dinilai memiliki sikap nasionalis kalau dia mau memperjuangkan agama nasional yang berdasar pada tema sentral theologia kovenan. Hal ini jangan dipahami sebagai upaya mewujudkan agama Negara, namun merupakan suatu sikap tunduk terhadap Negara berdasarkan tindakan-tindakan theistik.

a. Teologi Kovenan Perjanjian Lama

Istilah kovenan itu sendiri merupakan penegasan hubungan khusus atau komitmen

pada suatu perbuatan tertentu yang tidak terjadi secara alamiah. Ini disertai dengan sanksi-sanksi melalui sumpah yang biasanya dalam tradisi Yahudi dilakukan pada upacara atau pengesahan yang khidmat (Lasor, 1993:168). Teologi kovenan adalah sebuah persetujuan politis (political agreement) di dalam dunia Israel (2Sam 3:12-13, 21; 5:3) atau di antara bangsa-bangsa asing (1Raj 15:19) yang merupakan gambaran dari hubungan yang mengikat dalam kasih dan penuh loyalitas antara Allah dengan umat-Nya. Teologi kovenan ini menunjukkan kesetiaan Allah dalam memelihara umat-Nya dan karya providensia Allah ini tidak akan pernah berhenti. Theologia kovenan ini sangat berhubungan dengan kata-kata Ibrani *dābār* (word), *hōq* (statute), *piqqūd* ("precepts" – Maz 103:18), *ēdāh* ("testimony" – Maz 25:10), *tôrāh* ("law" – Maz 78:10) dan kata *khesed* ("lovingkindness" – Ul 7:9). Hal tersebut menunjukkan bahwa kuasa dan Anugerah Allah yang dinyatakan-Nya dalam kehidupan umat-Nya bukan membuat mereka terbebas secara total dari semua peraturan tetapi sebaliknya mewajibkan respon yang khusus dari mereka untuk selalu setia secara mutlak pada hukum Allah (Vine, 1985:50-51).

Setia maksudnya tidak pernah mengeluarkan protes kepada Allah atas apapun yang dialami umat Allah dalam kehidupannya, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan karya providensia Allah dalam kerangka kovenan Allah atas kehidupan umat-Nya tidak pernah bersifat negatif (cf. Yer 29:11). Eichrodt (1961:228-288) menunjukkan, sebagai sifat dari kovenan Allah (baca: theologia kovenan) tersebut adalah kuasa Allah, kesetiaan Allah, kebenaran Allah, kasih Allah, keadilan Allah, dan kekudusan Allah; dan keseluruhan sifat ini aktif secara bersamaan dalam satu realitas.

Teologi kovenan merupakan suatu pelaksanaan anugerah dan janji yang dengannya Tuhan menguduskan suatu umat bagi diri-Nya melalui dorongan-dorongan hukum ilahi. Tuhan memperlakukan umat-Nya dengan penuh anugerah, serta memberikan janji-janji-Nya kepada semua yang beriman kepada-Nya, dan menguduskan mereka untuk menata kehidupan mereka menurut hukum-Nya yang kudus. Pelaksanaan kovenan merupakan ekspresi konkret dari kerajaan Allah. Tuhan hadir bersama umat-Nya dan memperluas pemerintahan-Nya yang khusus

atas mereka. Esensi kovenan adalah janji, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu" (Kel 6:6; Ul 29:13; Yeh 11:20). Dari penjelasan tersebut jelas sekali bahwa theologia kovenan sangat erat hubungannya dengan hukum atau peraturan yang mengikat; di mana hal tersebut menjadi basic point dari theologia politik. Allah, Pencipta segala realitas, mengawali suatu hubungan dengan umat manusia, dan kemudian dengan satu bangsa pilihan, di bawah syarat-syarat suatu kovenan, suatu kesepakatan yang mengikat yang melibatkan berbagai janji dan kewajiban (Kappelle dan Currid: 2006:30).

Menurut Walter C. Kaiser, Jr. (2004:153-159), seorang pakar theologia biblika bidang Perjanjian Lama, menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan theologia kovenan, Allah memberikan hukum-Nya bukanlah sebagai cara Dia memperlakukan manusia seperti robot yang tidak memiliki kebebasan sedikitpun. Namun sebaliknya, hukum Allah tersebut sedang membuat manusia berada dalam kebebasan yang penuh dengan berbagai hak dan kewajibannya. Hukum Allah tersebut bersifat tunggal namun di dalamnya mempunyai tiga bagian, yaitu: hukum moral, hukum tentang upacara (aktivitas religius), dan hukum tentang hak-hak sipil. Dengan kata lain, ketiga bagian hukum tersebut harus dipatuhi dan dilakukan secara bersamaan, tanpa meninggalkan salah satunya oleh setiap orang khususnya umat pilihan Allah. Hukum Allah ini sesungguhnya sedang membentuk manusia yang bebas dan sekaligus mempunyai aksi moralitas yang baik. Itulah sebabnya, hanya Firman Allah-lah yang menjadi Sumber absolut sebagai dasar berdirinya atau terbentuknya berbagai hukum yang ada di dalam dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka keberadaan politik di Perjanjian Lama dalam konteks teologi kovenan selalu berpedoman pada hukum Allah. Kebebasan manusia dipahami sebagai kebebasan dalam hal menaati atau melanggar hukum tersebut. Ketika umat pilihan Allah dengan setia menaati hukum tersebut, maka berdasarkan theologia kovenan mereka pasti akan mengalami kesejahteraan hidup. Namun sebaliknya, jika mereka melanggar hukum tersebut, mereka pun akan mengalami kesulitan atau kesengsaraan dalam hidup (Davis: 1993:11). Tetapi supaya hal tersebut dapat dijalankan dengan baik dan teratur di

dalam dunia dibutuhkan suatu sistem yang tepat. Sistem itu dalam dunia Perjanjian Lama dikenal dengan sistem theokrasi. Di dalam sistem theokrasi ini, Allah membentuk pemimpin kharismatis (i.e. "Nabi") dan pemimpin *official* (i.e. "Imam" dan "Raja") sebagai instrument dari theologia kovenan.

b. Sistem Theokrasi Perjanjian Lama

Istilah "sistem" merupakan suatu bentuk yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling berinteraksi. Setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu akan mempengaruhi seluruh bagian dalam sistem itu, dan juga sistem itu mempunyai aktivasi dalam suatu lingkungan (environment) yang lebih luas serta ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Istilah "theokrasi" berasal dari dua kata Yunani *theos* yang berarti Allah dan kata *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi sistem theokrasi mempunyai maksud suatu sistem yang melandaskan kekuasaan pada revelasi Allah secara absolut.

Sistem theokrasi dalam Perjanjian Lama merupakan suatu sistem kepemimpinan atau pemerintahan dalam kehidupan sosial manusia yang bergantung sepenuhnya pada norma-norma hukum dari Allah secara langsung. Setiap bentuk hukuman Allah kepada manusia merupakan bentuk "pemerintahan manusia" berdasarkan legitimasi ilahi dalam kerangka theologia kovenan. Dengan kata lain, setiap hukuman diberikan sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan tidak nepotisme. Segala bentuk keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan berada di bawah intervensi Allah dan mempunyai motivasi hanya untuk memuliakan Allah. Sistem theokrasi ini dijalankan oleh bangsa Israel sebagai bentuk dedikasi mereka kepada Allah dalam memenuhi mandat ilahi demi memelihara dunia ciptaan Allah. Pemerintahan Allah atas bangsa Israel tersebut bertujuan untuk menjadikan bangsa Israel sebagai saksi yang tetap memperjuangkan keadilan dan mempergunakan kekuasaan secara benar di tengah-tengah kepalsuan bangsa-bangsa lain (Hutabarat, 2007:34-36). Allah memilih Nabi, Imam, dan Raja yang berindikasi pada bentuk trias politica Perjanjian Lama sebagai instrument teologi kovenan demi menjalankan sistem theokrasi ini.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika suatu pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem theokrasi, maka pasti segala sesuatu dijalankan dengan jujur dan adil tanpa ada sedikitpun bentuk tendensi yang mencari keuntungan individu. Walaupun memang dalam catatan sejarah Perjanjian Lama sering terjadi perselisihan antar-kelompok politik (factionalism) dalam piramida kekuasaan yang mana adanya pergulatan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar atas kuasa dan kekayaan, serta oleh penggunaan dan penyingkiran kewenangan yang disokong oleh kekuatan (Coote dan Coote, 2004:16). Namun fenomena seperti ini tidak dapat bertahan lama dalam sebuah pemerintahan. Pasti dieliminasi oleh Allah.

Perlu diperhatikan bahwa sistem theokrasi tersebut tidak sama sekali menunjuk pada adanya kekuasaan suatu agama tertentu terhadap Negara. Sebab sistem theokrasi hanya mengacu pada kesadaran masing-masing individu yang ada dalam suatu Negara, dan bangsa Israel pada waktu itu bersifat monotheistik, bukan pluralistik. Hal ini akan semakin diperjelas dalam pembahasan tentang konsep Negara dalam Perjanjian Lama.

i. Nabi

Allah juga membuat bentuk pemerintahan-Nya di dalam dunia secara teratur dan dilakukan berdasarkan tugas masing-masing individu pilihan. Hal ini bermaksud supaya suatu tanggungjawab dilakukan secara terfokus dan tidak tumpang-tindih, serta tidak adanya peluang munculnya sikap monopoli yang mencari keuntungan bertumpuk-tumpuk dengan mengorbankan orang lain. Namun trias politica Perjanjian Lama bentuknya masih sangat sederhana.

Nabi dipilih Allah dalam sistem theokrasi pada bentuk monarki Perjanjian Lama dengan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai jurubicara Allah, atas nama Allah, membimbing, menasihati, dan bahkan mengecam (bisa disebut pemegang kekuasaan yudikatif) para raja yang telah melanggar tanggungjawabnya. Setiap kata-kata yang disampaikan merupakan ucapan ilahi (ucapan berdasarkan Kebenaran). Para Nabi sering menghancurkan pengharapan individualis orang-orang seaman mereka dengan kritik profetis (Yes 6:27). Contohnya, ketika Daud bermaksud membangun Bait Allah, ia berkonsultasi dengan Nabi Natan

terlebih dahulu (2Sam 7:1-7). Ketika Daud mengawini Batsyeba secara licik, Nabi Natan mengecamnya dengan keras (2Sam 12:1-5). Natan juga membantu Salomo untuk naik takhta menjadi raja menggantikan Daud dan melantiknya menjadi raja Israel (1Raj 1:11-14, 38-40).

ii. Imam

Tugas imam adalah memimpin umat Israel untuk beribadah kepada Allah, dan berusaha agar peribadahan umat itu berlangsung secara teratur dan benar menurut tata kebiasaan agamawi yang berlaku. Imam harus mempelajari dan menafsirkan maksud dari peraturan-peraturan dan hukum-hukum dalam ibadah Israel, serta memberikan nasihat-nasihat mengenai cara pelaksanaan yang baik. Atau dengan kata lain, tugas imam adalah menyusun undang-undang yang konkret berdasarkan konteks (bisa disebut pemegang kekuasaan legislatif) atas dasar penafsiran ulang dalam tata cara ibadah Israel.

iii. Raja

Raja memiliki tugas politis sebagai oknum yang merealisasikan setiap peraturan (undang-undang) yang Tuhan telah nyatakan (bisa disebut pemegang kekuasaan eksekutif). Raja merupakan alat yang Tuhan pilih untuk mempertahankan keamanan dan kesejahteraan rakyat (baca: bangsa Israel) berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Raja diurapi (dilantik) sebagai tanda bahwa dia merupakan hamba Allah dalam menjalankan kehendak Allah bagi umat-Nya. Raja wajib untuk berupaya mengatur politik dan religi bangsa berdasarkan standar ilahi demi meneguhkan kovenan Allah (theologia kovenan) atas bangsa-Nya. Seperti contohnya Daud, yang adalah seorang tokoh karismatis, dapat mengatasi kecurigaan dan sikap menentang (oposisi) dari rakyat terhadap ide raja, serta mempersatukan mereka kembali menjadi suatu kekuatan aliansi yang luar biasa.

c. Negara dalam Perjanjian Lama

Karakteristik trias politica di atas belum berlangsung pada awal sejarah bangsa Israel, tetapi pada saat berdirinya sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan sebutan sistem monarki (kerajaan). Penulis hendak membahas secara singkat perkembangan bentuk pemerintahan dalam

Perjanjian Lama sampai terbentuknya Negara dan sekaligus memperjelas bahwa sistem theokrasi bukanlah bentuk Negara agama, sebab Negara agama tersebut sesungguhnya lahir dari pemahaman eksklusivisme absolut (fanatisisme).

Pada mulanya sejak manusia diciptakan kemudian ditempatkan di taman Eden, tepatnya sebelum adanya dosa, di sana tidak dilaporkan ada Negara dan perlunya Negara untuk mengatur umat manusia yang niscaya akan mengalami perkembangan. Kehidupan sosial manusia dapat berjalan tanpa Negara, sebab Allah sendiri yang menjadi Raja dan manusia secara total bergantung kepada Allah. Hal ini senada dengan pemahaman Luther dan Calvin bahwa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa belum ada Negara. Setelah kejatuhan, manusia tidak lagi bergantung secara total kepada Allah. Manusia tidak lagi mampu menggunakan kebebasannya tanpa mengganggu hak orang lain, bahkan seringkali membinasakan pesaingnya (cf. Kain dan Habel). Dalam perkembangan selanjutnya manusia pun terus bertambah jahat. Itulah sebabnya Allah melakukan intervensi dalam menciptakan Negara untuk pemeliharaan bumi. Jadi, Negara tidak berada dalam ordo penciptaan, tetapi dalam ordo pemeliharaan. Setelah Israel menjadi Negara, mereka harus menjalankan mandat Allah dalam memelihara dunia ciptaan Tuhan. Namun Negara Israel adalah "Negara gagal", di mana baru muncul kembali sebagai Negara pada abad 20 M, namun Negara Israel sekarang berbeda dengan Israel dalam Perjanjian Lama. Kegagalan Israel bukan berarti kegagalan Allah. Pemeliharaan Allah terhadap dunia yang diciptakan dilakukan melalui pemerintahan Negara non Israel, pemerintahan sekular (Hutabarat, 2007:33-39).

Walaupun Negara Israel gagal dan Allah memelihara dunia melalui pemerintahan sekular, bukan berarti sistem theokrasi pun ikut gagal. Sebab sistem theokrasi itu merupakan sistem kekuasaan kerajaan (baca: Negara) yang dibatasi oleh tradisi hukum-hukum ilahi dan oleh suara para Nabi (Browning, 2007:288-289). Sistem theokrasi ditujukan kepada masing-masing individu dalam pemerintahan yang dengan taat menjalankan hukum-hukum ilahi tersebut, seperti berlaku adil dan jujur terhadap semua individu dalam sebuah pemerintahan. Hal ini

dibuktikan melalui peran Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang terlibat aktif dalam sistem theokrasi pada pemerintahan raja Nebukadnezar. Bahkan Allah memerintahkan Israel melalui Yeremia untuk mengusahakan kesejahteraan daerah di mana umat Allah berada (Yer 29:7). Inilah suasana suatu Negara yang berada dalam sistem theokrasi. Jadi, sistem theokrasi mendasari masing-masing individu dalam sebuah pemerintahan sekular bukan pemerintahan yang bercorak golongan tertentu.

d. Hukum dalam Perjanjian Lama

Kata dasar untuk hukum adalah *tôrâh* (תורה) yang muncul kira-kira 220 kali dalam Perjanjian Lama dan berasal dari kata *yârâh* (ירה) yang berarti “mengarahkan dan mengajar”. Jadi hukum dalam Perjanjian Lama mengandung ide tentang pengajaran. Pengajaran di sini samasekali tidak terbatas pada lingkungan hukum, namun pengajaran ini diberikan oleh para ayah (Ams 3:1; 1:8), oleh orang-orang bijak (Ams 13:14), dan oleh nabi-nabi (Yes 1:10); yang mana pengajaran tersebut berpedoman pada kovenan Allah. Dalam struktur-struktur pemeliharaan suatu masyarakat, biasanya terdapat dua unsur, yakni kebijakan dan prosedur. Kebijakan merupakan dasar masyarakat yang bersifat hukum mengenai cara memelihara kehidupan dalam suatu masyarakat perjanjian. Maksudnya, keberadaannya sebagai suatu masyarakat terletak pada Allah yang telah memilihnya dan pada janji Allah untuk menopangnya. Sedangkan prosedur merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan (Dyrness, 2001:109-110).

Walter C. Kaiser, Jr. (1991:77-78) menambahkan bahwa motivasi utama dari melakukan hukum adalah supaya menjadi serupa dengan Allah, dalam hal kekudusan (Im 20:26) dan tingkah laku (Ul 10:17-19; 14:1-2; 16:18-20). Hukum diberikan sebagai tujuan untuk menyatakan kovenan Allah dan umat Tuhan selalu menyadari bentuk kovenan Allah dalam diri mereka (theologia kovenan). Hukum bukanlah suatu hal yang diada-adakan demi kepentingan kelompok tertentu, tetapi menunjukkan kepada setiap individu bagaimana perilaku yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai kepunyaan Allah. Hukum bersifat universal dan memiliki jangkauan yang luas.

Jadi hukum tidak di dasarkan pada golongan tertentu dalam suatu Negara, walaupun golongan tersebut merupakan mayoritas, tapi harus berdasarkan dan menyentuh semua kelompok. Sebab hukum tidak memihak mayoritas atau minoritas, kaya atau miskin, elit atau jelata, dan sebagainya. Hukum bersifat netral.

e. Kekuasaan dan Keadilan dalam Perjanjian Lama

Dalam perkembangan dewasa ini ketidakadilan di antara umat manusia telah menciptakan suatu dunia di mana yang kuat menindas yang lemah sedemikian rupa sehingga seolah-olah manusia sedang hidup di tengah-tengah dunia yang tidak beradab ketimbang kehidupan yang beradab. Mereka yang lebih kuat selalu tahu bagaimana cara membengkokkan hukum dan undang-undang sehingga mereka dapat meraih keuntungan yang sebesar mungkin tanpa mempedulikan kerugian yang dialami oleh kaum lemah (Kuyper, 2004:34).

Topik kekuasaan dan keadilan dalam Perjanjian Lama merupakan topik yang umum dibicarakan. Sebab berdasarkan theologia kovenan, Allah menghendaki setiap orang yang dipercayakan memiliki otoritas atau wewenang tertentu harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan dengan cara berusaha semampu mungkin menggunakan kekuasaan berdasarkan keadilan.

Hal ini dilakukan karena berlaku adil merupakan salah satu sifat Allah (Mzm 89:14) yang menjadi standar sikap hidup bagi setiap ciptaan-Nya (Mik 6:8). Di balik keadilan selalu melibatkan penghukuman (Hab 1:12), tetapi keadilan juga memperlihatkan karya keselamatan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan Allah merupakan bentuk kesetiaan-Nya terhadap umat perjanjian. Di sisi lain, setiap individu manapun yang memiliki kuasa harus tunduk pada kuasa Allah. Kuasa Allah dinyatakan dalam alam (Yes 10:12) dan dalam sejarah (Kel 15:6). Kuasa yang secara mutlak adalah milik Allah (Mzm 29:10) dan dalam Perjanjian Lama dinyatakan melalui nabi-nabi, imam-imam, dan raja-raja. Setiap kekuasaan yang diperoleh harus dilaksanakan dalam semangat pelayanan.

Salah satu dasar yang penting dalam agama Israel adalah perhatian Tuhan terhadap orang-orang yang tertekan. Dalam hal ini penulis membahas tentang ungkapan

nabi Zefanya (Zef 2:3) ketika melihat keadaan bangsa Israel yang saat itu sedang berada dalam tekanan. Dia mencoba meneliti apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dari keadaan seperti itu dan mencari solusi yang tepat bagi kemajuan bangsa.

Zefanya menemukan sumber penyebabnya adalah ketidakadilan yang membuat bangsa Israel saat itu berada pada keadaan miskin. Menurutnya, kemiskinan itu terjadi karena komunitas masyarakat yang tereksplorasi. Itulah sebabnya Zefanya menyampaikan tegurannya dengan nada suara yang keras, supaya mereka menyadari kondisi mereka saat itu dan mereka mau berusaha untuk keluar dari keadaan tersebut.

Alasan dari komentar itu adalah bahwa kata yang diterjemahkan LAI “rendah hati” sebenarnya berasal dari kata עָנָו *‘anaw* (“meek” KJV, “humble” NIV dan RSV) dan “kerendahan hati” berasal dari kata עֲנָוָה *‘anawa* (“meekness” KJV, “humility” NIV dan RSV); dan kedua kata itu semua menunjuk kepada makna miskin, yang pada saat itu dipandang Zefanya sebagai struktur ekonomi. Dalam konteks ini, kata ini dihubungkan dengan kata *qd,c, tsedeg* (“keadilan” LAI, “righteousness” KJV, NIV, RSV). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu terjadi karena tidak adanya keadilan. Sudah pasti ketidakadilan itu berasal dari oknum-oknum yang berada dalam keadaan yang berkelimpahan di mana selalu mengkambinghitamkan kaum yang lemah untuk kepentingan pribadi mereka; namun di sisi lain hal itu juga ditujukan bagi oknum-oknum yang berada dalam kemiskinan tersebut, karena merekalah yang harus menyatakan dan menegakkan keadilan pada saat itu.

Selanjutnya, yang menjadi sumber dari keadilan itu adalah TUHAN. Dalam rangka seseorang mencari keadilan tersebut harus selalu didasarkan pada hukum atau peraturan Allah. Artinya, tidak ada keadilan kalau segala sesuatu tidak didasari oleh hukum TUHAN. Adil di sini berarti memiliki kejujuran dan ketabahan dalam menjalankan kekuasaan dengan sikap rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia, walaupun beresiko tidak mendapatkan penghargaan dari manusia dan tidak memperoleh keuntungan. Adil juga berarti menempatkan kepentingan ekspansionis tidak lagi sebagai prioritas. Sebaliknya, jauh lebih penting adalah

mengusahakan nilai-nilai kemanusiaan. Jauh lebih berharga mempertahankan nilai-nilai kehidupan dengan mempergunakan kekuasaan dalam bentuk berupa sebuah kehadiran nilai baik di antara sesama.

Kebesaran suatu bangsa bukanlah bergantung pada jumlah penduduknya, atau jumlah tentaranya, atau kekuatan politik dan ekonominya, atau standar intelektual dan peradabannya. Keagungan yang sesungguhnya dari suatu bangsa ditentukan oleh kehidupan publiknya secara nasional dan pergaulan bangsa itu dengan bangsa lainnya secara internasional, yang dilandasi oleh kebenaran dan keadilan (*s^edaqah*). Kehidupan yang berdasarkan kehendak Allah ialah kehidupan yang sesuai dengan norma moral, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, ketulusan, bukan pada kekuasaan, massa, atau kepandaian. Nilai-nilai kebenaran, sopan santun, budi pekerti dan kesalehanlah yang menghasilkan status terhormat dan berharga suatu bangsa (Marx, 2005:24).

2. Paradigma Politik di Zaman Perjanjian Baru

Berbicara tentang politik dalam Perjanjian Baru pasti selalu berpusat pada satu tokoh sentral yang merupakan Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yakni Yesus Kristus. Dalam perjalanan pelayanan-Nya di dunia, di latarbelakangi oleh sejarah Perjanjian Baru yang umumnya menceritakan kelanjutan perjalanan orang-orang Yahudi dalam menghadapi penjajahan Romawi yang sangat kejam (Mawene, 2004:47). Dalam memperjuangkan kemerdekaan politis atas penjajahan tersebut, orang-orang Yahudi tersebut berhadapan dengan dua kebudayaan raksasa kuno yakni kebudayaan Yunani (*hellenisme*) dan kebudayaan Romawi. Secara garis besar, ada tiga bentuk tanggapan atas kedua kebudayaan tersebut, yakni menolak secara radikal, menerima salah satunya, dan menerima kedua-duanya (*sinkretis*). Biasanya orang-orang Yahudi yang menolak secara radikal bentuk-bentuk kebudayaan tersebut, khususnya Romawi, merupakan himpunan orang yang berani menentang penguasa dan pasti akan disertai oleh konsekuensi penindasan serta kesulitan hidup, sedangkan kelompok-kelompok yang menerima keseluruhan bentuk kebudayaan itu merupakan himpunan orang yang menjadi kuda tunggangan penguasa dan sekaligus

mengharapkan kenyamanan-kenyamanan jasmaniah dari penguasa tersebut.

Kelompok para penguasa di kenal dengan karakteristik religius yang bercorak agama kafir dan sinkretis, sehingga kelompok orang Yahudi yang menjadi kuda tunggangan penguasa dipandang sebagai orang-orang yang sedang tersesat dari religiusitas monotheistik mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Yesus dan rasul-rasul-Nya, selain pada perjalanan selanjutnya berkembang juga pada semua orang (yang tidak termasuk dalam golongan orang Yahudi), menjalankan misi politis dalam sistem berpikir politik mereka di dunia Perjanjian Baru.

Kehidupan Yesus Kristus yang secara gamblang dikisahkan dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, memiliki tema sentral bahwa Yesus datang untuk memproklamasikan kedatangan suatu zaman baru seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi Yeremia (31:31) yang di dalamnya pemerintahan Allah atas segala sesuatu akan didirikan kembali, dan lebih dari itu, Dia adalah perantara dan melalui Dia Kerajaan Allah yang baru ini (Kerajaan Sorga dalam Injil Matius) akan menjadi suatu kenyataan (Urban, 2003:29). Berkenaan dengan konsep Kerajaan Allah, hal ini merupakan tema yang paling dominan dalam pengajaran Yesus dan dalam pembahasan Injil Sinoptik. Strevri Lumintang (2006:103) menyatakan bahwa Kerajaan Allah itu juga merupakan Kerajaan Yesus karena pemerintahan Allah yang bersifat menebus dimanifestasikan di dalam dunia, kepada manusia, melalui dan di dalam pribadi serta karya Kristus. Namun dalam garis kenabian dan Kerajaan Allah itu, Yesus tidak memberi status kekal dan ilahi pada lembaga religius (Yudaisme) dan politis yang di dalamnya ia hidup (Ranoh, 1999:156).

Kehidupan politik pada jaman Yesus yang di saksikan para penulis Injil Sinoptik adalah bagaimana bisa hidup dan *survive* di dalam Negara dan masyarakat non-Kristen. Secara umum, anjuran Yesus yang digambarkan dalam Injil Sinoptik mengenai sikap terhadap pemerintah adalah bahwa Negara merupakan institusi yang tidak berasal dari Allah tapi ada di dunia, karena itu ketaatan kepada Negara merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dipungkiri namun kedaulatan Negara harus berada di bawah kedaulatan Allah (Singgih, 2004:164). Itu berarti semua urusan kenegaraan harus didasarkan pada batu uji

theologia kovenan dan sistem teokrasi. Jika bentuk-bentuk kebijakan suatu Negara ternyata didapatkan tidak sesuai dengan standar batu uji tersebut, maka sikap penolakan warga Kerajaan Sorga tidak dipandang sebagai tindakan berdosa namun sebaliknya dianggap sebagai upaya kekudusan dalam mentransformasi sistem pemerintahan tersebut.

Konsep yang begitu kuat sehubungan dengan theologia politik dalam Injil Sinoptik adalah mengenai kemesiasan Yesus (Guthrie, 1992:285). Bagi orang-orang Yahudi, Yesus dipandang sebagai tokoh Mesias secara politik sebagai penerus raja Daud yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi dan sekaligus memerintah atas mereka; namun ternyata konsep seperti ini berbeda dengan pemahaman Yesus yang memandang kemesiasan-Nya secara spiritualis. Hal ini begitu jelas dalam peredaksian Matius (1:1-17) dan Lukas (3:23-38) mengenai silsilah keturunan Yesus yang berasal dari Daud, dipandang sebagai garis keturunan yang bersifat spiritualis, dalam pengertian bahwa Yesus memiliki status yang lebih tinggi daripada Daud (bnd. Mrk 12:35-37; Mat 22: 41-46; Luk 20:41-44). Dengan kata lain Yesus menurut para penulis Injil Sinoptik hendak menyatakan bahwa jabatan Mesias atas diri-Nya mengandung arti sebagai "Tuhan". Hal tersebut menunjukkan bahwa kedatangan Yesus di tengah-tengah perjuangan politis-Nya di dalam dunia hendak menyatakan bahwa diri-Nya adalah Tuhan yang akan membebaskan setiap orang dari tekanan dosa (arti spiritualis). Maksud ini begitu jelas dalam nyanyian Zakharia yang diredaksi oleh Lukas (1:68-79) yang sangat kuat dengan pengharapan nabi-nabi dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias secara spiritualis. Linwood Urban (2003:39) mengungkapkan hal serupa, bahwa:

Di dalam Injil Sinoptik Yesus disebut Mesias. Namun, Ia tidak digambarkan sebagai seorang pemimpin militer atau politik, seorang Daud kedua. Dia digambarkan sebagai Musa baru, guru dan penafsir Hukum, nabi Kerajaan dan juga perantaranya, baik dalam mengalahkan roh-roh jahat dari kehidupan pribadi maupun dalam memerintah berbagai kekuatan alamiah dunia melalui penyembuhan dan mujizat yang lain. Setelah kematian Yesus di

atas kayu salib, peranan-Nya dalam rencana penyelamatan Allah dipertahankan-Nya melalui peristiwa kebangkitan.

Ungkapan Yesus yang khas bernuansa politik di dalam Injil Sinoptik adalah “berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah!” (Mat 22:15-22; Mrk 12:13-17; Luk 20:20-26). Ungkapan ini diucapkan Yesus ketika Dia berdialog dengan kalangan Farisi dan Herodian yang coba menjebak-Nya. Orang Yahudi menolak membayar pajak Roma, disebabkan karena pajak itu sangat tinggi bagi kalangan orang Yahudi dan dalam pemahaman mereka ketika membayar pajak maka dengan sendirinya Kaisar sudah menjadi raja mereka, yang mana semestinya hanya Allah saja yang boleh menjadi Raja Yahudi. Itulah sebabnya ada dua perangkap yang terkandung dalam pertanyaan tersebut, yakni: bila Yesus mengatakan bayar pajak, maka rakyat akan berhenti mengikuti-Nya; tetapi bila Yesus mengatakan jangan membayar pajak, maka Ia akan dipandang sebagai pengkhianat yang melawan Roma dan saat itu juga Ia akan dibawa kepada gubernur Roma, Pontius Pilatus, untuk dihukum mati (Danes dan Danes, 2000:88). Namun sistem berpikir Yesus mengenai sistem politik theokrasi yang Dia tuangkan secara implisit dalam jawaban-Nya membuat dua kalangan Yahudi tersebut tidak dapat menjebak-Nya. Hal inilah yang menjadi dasar berpijak realitas perjuangan Injil para pengikut Yesus di kemudian hari.

B. Sejarah Paradigma Politik Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Modern

Dalam dunia klasik (Yunani kuno) ada tiga tokoh penting yang menjadi dasar pijakan pembahasan tentang politik, yaitu: Thucydides, Plato, dan Aristoteles.

Bagi Thucydides, manusia termotivasi oleh tiga dorongan besar: ketakutan, kehormatan, dan kepentingan diri sendiri. Setiap orang yang secara teguh memegang kekuatan-kekuatan ini akan berhasil dalam politik. Atau dengan kata lain, Thucydides beranggapan bahwa “yang kuat menentukan kebenaran” (Losco dan Williams, 2005:19-22).

Sedangkan Plato menginvestigasi politik dalam sikap filosofis dan tujuan sejati semua ini adalah untuk memahami kebaikan, di mana

konsep-konsep politik tertentu seperti “keadilan” dihubungkan sebagai bagian-bagian ke keutuhan. Kosmologi Plato membagi dunia menjadi dua lingkup, yaitu: lingkup gagasan atau bentuk-bentuk, dan lingkup sesuatu yang ada kemudian tiada (dunia materi). Keadilan bagi Plato sebagai sebuah hal ideal atau bentuk, kandungan yang dapat diinvestigasi secara filosofis lewat ketrampilan penguasa yang baik dalam *polis* atau kota sebenarnya. Keadilan meminta setiap bagian harus memainkan perannya sendiri dan tidak mencoba menjalankan fungsi bagian-bagian lain (Losco dan Williams, 2005:98-101). Pada bab VIII dan IX dalam *Republik*, Plato mengemukakan pola penurunan kualitas sistem pemerintahan yang mengarah pada bentuk-bentuk degenerasi (dekadensi) konstitusi politik, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Paparan yang pertama dan tingkatan yang paling lapuk yakni tentang degenerasi politik adalah berdasarkan pada suatu kegagalan dalam pendidikan para penguasa. Bila pendidikan para penguasa terlalu menekankan latihan fisik dan menanamkan pada mereka suatu pandangan berlebihan tentang keahlian perang, maka kelas penguasa akan menjadi terbagi untuk melawan dirinya sendiri dan kekuasaan politik akan jatuh ke tangan yang agresif, yaitu kelompok-kelompok yang gila kehormatan, sehingga membentuk pola pemerintahan yang bersifat timokrasi (pemerintahan berdasarkan nilai). Sesuai dengan usia kekuasaan mereka, para penguasa suatu Negara timokratik akan mengembangkan suatu peningkatan tendensi akan kekayaan dan kemewahan. Begitu kekayaan menjadi objek dari kepentingan-kepentingan politik, timokrasi digantikan oleh suatu oligarki para plutokrat (orang-orang kaya). Dalam suatu oligarki, Negara terpisah menjadi dua bagian, yakni sebuah kota yang kaya mendominasi sebuah kota yang miskin. Bila suatu keserakahan yang berlebihan telah menggoyahkan kemantapan Negara oligarkik, peperangan bermunculan di antara kelas-kelas dalam Negara; bila kaum miskin menggulingkan kaum kaya, suatu demokrasi terbentuk. Dalam demokrasi, setiap warga Negara adalah penguasa bagi dirinya sendiri; suatu Negara demokratik tidak memiliki kebijakan yang konsisten, tidak ada sistem hukum yang efektif. Ketika seseorang muncul dan dapat mempengaruhi massa rakyat untuk memilih dia sebagai pemimpin perlawanan

terhadap kelas yang lebih kaya yang terus-menerus berusaha mendirikan oligarki, dan kelas kaum pemalas menghabiskan waktunya untuk bermain politik, sebuah tirani akan kukuh berdiri (Melling, 2002:163-164).

Tokoh lainnya bernama Aristoteles. Ia menulis suatu risalah yang berjudul *Politeia* (politics). Ia menegaskan bahwa manusia adalah *zoon politikon*, si binatang politik. Bagi Aristoteles, manusia dapat dipahami lewat keluhuran fungsi alami, yang ketika berkembang sepenuhnya, membedakannya dari seluruh makhluk yang lain. Kecenderungan alamiah dari manusia ialah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok, dan bertindak sebagai kelompok. Sasaran politik adalah untuk mencapai *eudaimonia*, kesejahteraan yang sangat penting dan vital bagi setiap orang (Bagus, 2000:857).

Akal adalah fungsi tersebut, yang disebutnya sebagai hal terbaik dalam diri manusia. Akal menempatkan manusia di atas seluruh makhluk lain dan memberinya kesempatan untuk menata hidup dan komunitas politiknya. Namun, akal hanya dapat merebak dalam komunitas-komunitas politik ketika terdapat waktu untuk bercermin dan kesempatan untuk berwacana. Politik bagi Aristoteles secara khusus bersifat praktis karena ia berurusan dengan kehadiran harmoni dan tatanan kota lewat tindakan-tindakan berbagai individu. Baginya, tidak semua mampu menampilkan fungsi-fungsi yang sama dalam Negara. Manusia bersifat politis karena ia membagi-bagi tugas-tugas politik berdasarkan kapasitas akal dalam kepentingan untuk menjamin harmoni sosial. Perempuan dan budak haruslah memegang status politik yang lebih rendah daripada warga pria (Losco dan Williams, 2005:177-178).

Pada perkembangan selanjutnya, ketika bertumbuhnya Kekristenan, segera setelah jatuhnya Roma di tahun 410, beberapa pengarang dan politisi menduga bahwa Kekristenan sendiri bertanggungjawab atas hancurnya keluhuran sipil rakyat Roma dan atas hancurnya stabilitas politik Roma.

Agustinus, seorang Uskup Hippo (sekarang Annaba), menulis bukunya yang terkenal dengan judul *The City of God* sebagai bentuk pembelaannya dari serangan-serangan tersebut di atas. Gagasan-gagasan politik utama Agustinus yang dituliskan dalam bukunya tersebut, berpusat pada konsepnya

tentang “dua kota”. Dia menjelaskan bahwa manusia terdiri dari dua kelompok yang hadir bersama dan saling bercampur, yakni mereka yang tinggal di kota duniawi (Kota Manusia), dan mereka yang tinggal di Kota Surgawi (Kota Tuhan). Orang-orang di kota duniawi hidup mengikuti sifat lahiriah mereka dan mencintai diri sendiri dengan merendahkan Tuhan. Orang-orang yang hidup di kota duniawi ini terkena kutukan untuk menjalani hidup mereka dengan penuh masalah, kelangkaan, pertikaian, dan kekerasan. Karena mereka tidak mencintai Tuhan, satu kekuatan eksternal (Negara) harus mengatur nafsu-nafsu mereka yang tak terkendali. Dalam pengaturan tersebut, konflik-konflik dapat dikendalikan sehingga mereka dapat menikmati harta duniawi tanpa menjadi korban suatu kematian dini yang kejam. Namun setelah Hari Penghakiman, bagaimanapun juga mereka tetap akan dihukum dengan siksaan abadi. Sebaliknya, Kota Surgawi (terdiri dari mereka yang mencintai Tuhan dan merendahkan diri) adalah sebuah tatanan yang didasarkan pada kasih Tuhan dan dicirikan oleh keberadaan keadilan sejati, kedamaian, harmoni, dan kebijaksanaan. Tatanan tersebut dihuni oleh kaum pilihan (kaum tebusan) yang terwujud melalui Kebangkitan Kristus (Losco dan Williams, 2005:335-337).

Pada intinya ada dua peristiwa nyata yang dialami dan mempengaruhi Agustinus ketika menulis bukunya, yakni kejatuhan Roma di tangan bangsa Barbar Visigoth dan Alarik seperti yang disebutkan sebelumnya dan diterimanya agama Kristen melalui dekrit politik Kaisar Theodosius untuk menjadi agama resmi imperium Romawi pada tahun 393 M (Suhelmi, 2001:74).

Sejak abad pertengahan, pemikiran politik Yunani mulai mempengaruhi dunia barat. Seorang tokoh yang terkenal bernama Thomas Aquinas memaparkan pemahaman politiknya dalam bukunya “*Summa Theologica*” dan naskah singkat “*On Kingship*”. Menurut Aquinas, terdapat dua rute menuju pengetahuan, yaitu melalui akal dan melalui iman. Akal memberikan bimbingan untuk bertindak. Akal adalah suara hukum alam, gagasan bahwa Tuhan secara bertahap menanamkan insting dan kemampuan yang, seandainya diikuti dengan tepat, akan membawa pada tindakan benar (Aristotle, 1981:16). Namun, akal memiliki kelemahan. Sekalipun dapat menyediakan pengetahuan

tentang dunia ini, ia hanya sedikit mengungkapkan masa depan. Inilah tugasnya iman, dan Alkitablah yang menjadi pemandunya. Salah satu kebenaran yang diajarkan adalah sosialitas manusia. Keluarga dan Negara menurutnya (mengikuti Aristoteles) adalah hal yang alami. Setiap individu tidak dapat memenuhi kesejahteraannya sendiri. Dengan demikian, Negara merupakan bentuk terlengkap dari sosialitas. Meskipun pencapaian kesepakatan di antara banyak individu adalah sulit, meneguhkan kesatuan dan kedamaian merupakan tanggungjawab utama penguasa. Ini merupakan kondisi-kondisi awal yang dibutuhkan seandainya masyarakat (yang dibimbing) oleh gereja ingin menempuh usaha terpenting, keselamatan jiwa (Nederman and Forhan, 1993:99).

Pada jaman reformasi, Martin Luther dan John Calvin merupakan tokoh-tokoh penting berkenaan dengan pemahaman tentang politik. Dengan menolak pemahaman politik di akhir abad pertengahan, Luther (dalam Smith, 2008:244-257) mendukung tiga prinsip yang membentuk pemikiran politik reformasional. *Pertama*, ia mengatakan bahwa karena Allah telah melembagakan otoritas sekuler, maka otoritas para penguasa langsung berasal dari Allah. Dengan demikian, Allah melarang pemberontakan terhadap otoritas yang ada dalam segala keadaan. Sehingga otoritas sipil dan eklesiastikal sama sekali berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. *Kedua*, ia menegaskan bahwa Allah menyatakan hukum-Nya kepada semua orang dan bahwa rasio berfungsi untuk menata urusan-urusan manusia. Dalam Negara seseorang harus bertindak atas dasar rasio (sumber ketetapan-ketetapan hukum) karena Allah telah menundukkan pemerintahan dunia ini dan urusan-urusan badan itu di bawah rasio. *Dan ketiga*, berdasarkan Roma 12 dan 13, Luther berpegang bahwa gereja melayani pembimbingan dan damai sejahtera bagi manusia batiniah (spiritual) dan kepentingan-kepentingannya; pemerintah melayani manusia lahiriah (duniawi) dan kepentingan-kepentingannya. Walaupun Luther dengan tajam membedakan dua penguasa tersebut, namun ia percaya bahwa gereja dan Negara harus bekerja sama secara erat dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka yang saling melengkapi itu. Gereja memerintah atas kehidupan spiritual melalui Firman Allah (the Word). Beroperasi dengan kasih dan

kerendahan hati, gereja berusaha menolong orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus sehingga mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Negara, sebaliknya, memerintah atas kehidupan temporal melalui kekuatan pedang (the sword). Melalui paksaan dan kekuatan, Negara mengekang para pelaku kejahatan dan memelihara kedamaian duniawi. Bagi Luther, jika setiap orang adalah seorang Kristen yang sejati, maka pemerintah tidak diperlukan. Meskipun orang-orang Kristen tidak memerlukan pemerintah, mereka harus melayani dalam Negara untuk memajukan keadilan dan menolong sesama mereka.

Lebih kuat dari Luther, tokoh kedua yakni John Calvin (dalam Smith, 2008:257-268) memiliki pemahaman yang bertumpu pada tiga prinsip theologis, yaitu: kedaulatan Allah, pekerjaan orang Kristen, dan anugerah umum. Karena Allah berdaulat, Ia adalah Tuhan atas segala ciptaan, bukan hanya sebagian daripadanya. Kerajaan-Nya meliputi seluruh kehidupan. Agama, ketetapan-ketetapan hukum, dan otoritas parlemen semuanya membatasi kekuasaan raja. Para penguasa tidak diberi kekuasaan yang tidak berkecang. Mereka harus bertanggungjawab kepada Allah dan manusia dalam menjalankan kekuasaan mereka. Pada dasarnya konsep Calvin tentang Negara bertumpu pada idenya tentang kovenan yang ia tarik terutama dari hubungan yang ada antara Allah dan Israel Perjanjian Lama. Calvin menyatakan bahwa Allah telah menetapkan pemerintahan sipil untuk memenuhi suatu peran yang pasti tetapi terbatas. Gereja dan Negara harus berbeda, tetapi keduanya harus bekerja bersama secara erat untuk melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Tanggungjawab gereja terutama bersifat spiritual; gereja tidak seharusnya berusaha untuk menetapkan hukum-hukum sipil. Negara harus memerintah urusan-urusan eksternal kehidupan; Negara tidak seharusnya mencampuri pelayanan dalam gereja.

Memasuki modernitas ada beberapa nama yang memberikan sumbangsih pemikiran di dunia politik secara umum, yaitu: Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Reputasi Niccolo Machiavelli sebagian besar didasarkan pada nasihat amoral yang diberikannya dalam *The Prince*, ditulis pada tahun 1513. Dalam karya *The Prince* itu

Machiavelli menempatkan dirinya sebagai seorang pakar politik kekuasaan, sehingga Max Lerner menyebutnya “Bapak Politik Kekuasaan” (Suhelmi, 2001:132).

Machiavelli (dalam Losco dan Williams, 2005:19-20) mendesak para penguasa politik di jamannya untuk mengesampingkan norma-norma dan nilai-nilai konvensional. Ia percaya bahwa rezim-rezim masuk ke dalam dua tipe, yaitu: kepangeranan (*principality*) dan republik. Baginya, dalam mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan, seorang penguasa bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan Negara. Kejayaan merupakan ambisi politik definitif – yang dikejar dalam batas-batas yang ditentukan oleh akal, kearifan, nasib baik, dan kebutuhan. Menurutnya, penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal di antaranya: (1) sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti; (2) watak-watak seperti ketegasan, kejayaan, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri; serta (3) sebuah reputasi menyangkut kemurahan hati, pengampun dapat dipercaya, dan tulus. Machiavelli merekomendasikan kekuasaan populer sebagai jalan menuju stabilitas, keamanan, dan kejayaan politik.

Thomas Hobbes (dalam Losco dan Williams, 2005:73-75) berpendapat bahwa moralitas dan politik manusia dapat dipahami pada basis unit-unit gerakan sederhana. Ia membangun psikologi politik yang mengajukan sebuah pandangan tentang manusia yang digerakkan oleh gairah-gairah dan nafsu-nafsu. Seperti contohnya hasrat untuk mendapatkan opini baik dari orang lain yang pada akhirnya akan menuju pada terjadinya konflik dan gairah membara akan kekuasaan yang hanya berhenti dengan kematian. Ada juga gairah-gairah yang condong menuju pada kedamaian, yang terpenting darinya adalah ketakutan terhadap kematian. Hobbes menerima sistem monarkis yang memberikan seluruh kekuasaan kepada satu pemegang kedaulatan.

Berbeda dengan Hobbes, John Locke (dalam Losco dan Williams, 2005:134-137) sangat menentang sistem monarkis. Lockelah yang menciptakan teori toleransi praktik-praktik keagamaan seperti yang diungkapkannya dalam bukunya yang berjudul “*A Letter on Toleration*”. Tiga tema utama yang ditekankan Locke berkenaan dengan pembahasannya tentang politik,

seperti diungkapkannya dalam bukunya berjudul “*Second Treatise*”, adalah properti, kesepakatan, dan hak resistensi.

Tokoh lainnya adalah J. J. Rousseau yang terkenal dengan tulisan-tulisannya bersifat paradoks. Menurutnya, manusia terlahir bebas dan di mana-mana ia mengenakan rantai. Ia berbicara tentang hubungan antara kehendak individual dan kehendak umum komunitas, di mana dalam beberapa kasus manusia harus “dipaksa untuk bebas”. Rousseau membayangkan manusia pada dasarnya soliter. Ia menggambarkan manusia alami sebagai makhluk yang polos dengan kepentingan diri yang dibentuk oleh simpati alami. Ia menegaskan bahwa manusia sosial harus mereorganisasi kehidupan politik sehingga menjunjung kebebasan dan kesetaraannya, dalam konteks komunitas politik (Losco dan Williams, 2005:221-224).

Memasuki abad ke-19 seiring dengan adanya Revolusi Perancis, konsep politik dipegaruhi oleh kenyataan baru seperti: bangkitnya masyarakat massa, kedatangan satu psikologi pemenuhan diri, dan tumbuhnya kepedulian terhadap hambatan-hambatan substansial bagi kebahagiaan manusia. Sehingga fokus pembahasan politik pada dunia liberalisme abad ke-19 mulai mendukung hasrat akan pemerintah yang intervensionis dan konsepsi kebebasan positif. Kekuatan-kekuatan historis utama seperti industrialisasi, urbanisasi, dan demokratisasi bukan hanya mentransformasikan liberalisme, namun juga membentuk seluruh pemikiran sosial dan politik. Akhirnya memasuki abad ke-20 fokus pembahasan politik menunjuk pada pencarian titik pijak yang valid bagi teori dan praktik politik pada segala sesuatunya mulai kemutlakan-kemutlakan fundamentalisme hingga kemajemukan yang diwujudkan dalam multikulturalisme (Losco dan Williams, 2005:467-469).

Tiga tokoh penting yang berpengaruh pada masa ini adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, dan Friedrich Nietzsche. Aspirasi G. W. F. Hegel adalah untuk mempertahankan manfaat-manfaat keterpisahan, kesadaran rasional yang bebas, sambil merekonsiliasinya dengan kesatuan, yaitu: masyarakat, Tuhan, dan nasib. Hegel mencoba memberikan garis besar sebuah tatanan sosial yang akan mengatasi pertentangan-pertentangan. Tumbuh dari kesatuan keluarga yang tak reflektif,

seseorang menjadi satu individu yang mengejar kebutuhan-kebutuhan uniknya dalam masyarakat sipil, dijaga oleh struktur-struktur sipil dan pidana. Struktur-struktur ini dengan sendirinya bergantung pada Negara, yang idealnya diorganisasikan sebagai satu monarki konstitusional (Losco dan Williams, 2005:470-472). Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan "Roh Absolut" (Great Spirit atau Absolute Idea). Karena itu Negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transendental individu. Baginya, Negara merupakan suatu tahap perkembangan ide mutlak. Perkembangan ini ditandai oleh proses gerak dialektis yang terjadi antara tesis-antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Dari sintesis ini kemudian muncul lagi tesis-antitesis dan seterusnya. Proses dialektik ini baru berakhir setelah tercapainya ide mutlak itu (Suhelmi, 2001:258).

Selanjutnya Karl Marx yang dikenal secara luas sebagai pendiri ideologi komunis sebenarnya adalah seorang teoritikus besar kapitalisme. Di mata Marx Negara sebagai alat borjuasi kapitalis semata. Dia mengakui bahwa Negara kapitalis akan selalu berwajah hewan buas. Negara menjadi serigala bagi warga negaranya sendiri (Suhelmi, 2001:288). Kapitalisme adalah satu kekuatan revolusioner dalam dunia modern – secara total mentransformasi ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Menurutnya, masyarakat sebagai satu jaringan hubungan antarpribadi, sebagai keutuhan organik yang menjalani evolusi historis, membentuk kegiatan-kegiatan manusia, dan menyusun apa yang disebut sebagai sifat manusia (masyarakat komunis). Marx membentuk sebuah lingkup politik demokrasi dan perencanaan ekonomi radikal serta satu komunitas sejati dari individu-individu asli. Titik awal Marx adalah produksi dalam kehidupan material. Proses di mana kerja secara simultan adalah cara-cara pemuasan kebutuhan, memperbaiki kehidupan, dan mengaktualisasi diri. Kerja manusia secara potensial adalah kegiatan bebas dan sadar.

Tokoh yang terakhir adalah Friedrich Nietzsche. Ia merupakan seorang tokoh yang mengeluarkan sebuah statement "Tuhan telah mati" dan frasa "kehendak akan kekuasaan". Menurutnya, moralitas sekedar merupakan sebuah piranti yang digunakan oleh yang lemah untuk mengendalikan yang kuat dan pada akhirnya akan bangkit satu manusia

super (Übermensch) – sejenis orang yang tidak takut melanggar moralitas konvensional dan mengejar horizon-horizon baru melalui kritik diri secara intensif dan tantangan pribadi. Baginya, seluruh kehidupan, dengan eksistensinya berusaha mengendalikan lingkungannya. Nietzsche melanjutkan, moralitas konvensional, dengan kategori-kategori seperti dosa, belas kasihan, dan Tuhan, telah membenamkan kehendak akan kekuasaan ke sebuah etika pengingkaran diri yang asketis. Orang harus menjalani satu kehidupan dengan penegasan diri dan keunggulan berarti, daripada sebuah kehidupan mediokritas yang mudah terpuaskan dan penghambaan (Losco dan Williams, 2005:759-761).

PENUTUP

Politik selalu berbicara mengenai urusan dan kebijakan-kebijakan tertentu dalam suatu Negara dan dasar pijakan dari kebijakan-kebijakan tersebut terletak pada masyarakat. Realitas politik dalam garis sejarah mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Para pemikir politik kuno memusatkan perhatiannya kepada masalah Negara ideal, para pemikir politik abad pertengahan melibatkan diri mereka pada pengembangan suatu kerangka bagi adanya pendirian Kerajaan Allah di dunia, sedangkan para pemikir politik pada jaman sesudahnya telah melibatkan diri mereka pada masalah-masalah lainnya seperti kekuasaan, wewenang dan lain-lain; yang selanjutnya pembahasan tentang politik berfokus pada masalah kelembagaan (organisasi). Dari hal ini sangat jelas bahwa pada intinya perubahan paradigma dari pembahasan politik itu terletak pada fenomena politik yang menunjuk pada masalah-masalah sosial manusia. Ketika seseorang berbicara tentang masalah-masalah sosial manusia sebenarnya ia sedang berpolitik.

Pada prinsipnya, politik yang awal mulanya bertujuan untuk mengejar *phronesis*, kebijaksanaan praktis agar warga hidup baik sesuai tujuan Negara, mengalami pergeseran di mana politik dipisahkan secara radikal dari urusan etika dan hukum, yang akhirnya menyerahkan politik beroperasi di bawah rasio instrumental dan kehilangan kaitannya dengan persoalan nilai. Itulah sebabnya politik dewasa ini dipandang sebagai suatu istilah yang bersifat sugestif dan sering negatif, yang

memuat sesuatu yang kabur, tersembunyi, menjijikkan, curang, dan berbahaya.

REFERENSI

- Aristotle. (1981). *The Politics*, translated by. T. A. Sinclair. USA: Penguin Classics.
- Baechler, Jean. (2001) *Demokrasi: Sebuah Tinjauan Analitis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bagus, Lorens. (2000). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia.
- Crouch, Harold. (1982). *Perkembangan Politik dan Modernisasi*. Jakarta: Citra Swatama.
- Davis, John Jefferson. (1993). *Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today*. Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing.
- Danes, Simon dan Danes, Christoper. (2000). *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Drane, John. (2002). *Memahami Perjanjian Lama 1*. Jakarta: Persekutuan Pembaca Alkitab.
- Dyrness, William. (2001). *Tema-Tema dalam Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.
- Eichrodt, Walther. (1961). *Theology of the Old Testament*, trans. J. A. Baker. Philadelphia: Westminster Press.
- Gie, The Liang. (1986). *Ilmu Politik*. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Guthrie, Donald. (1992). *Teologi Perjanjian Baru 1*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Harris, R. Laird (eds.). (1980). *Theological Wordbook of The Old Testament*. Chicago: Moody Press.
- Hutabarat, Binsar A. (2007). "Negara Menurut Perjanjian Lama dan Hubungannya dengan Gereja dalam Konteks Indonesia", *Jurnal Stulos*, 6(1), 34-36.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Kaiser, Walter C. Jr. (1991). *Toward Old Testament Ethics*. Grand Rapids: Zondervan.
- Kaiser, Walter C. Jr. (2004). *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.
- Kappelle, Robert P. Vande dan Currid, John D. (2006). "Perjanjian Lama: Kovenan antara Allah dan Manusia", dalam *Membangun Wawasan Dunia Kristen Vol. 1*, diedit oleh W. Andrew Hoeffcker. Surabaya: Momentum.
- Kuyper, Abraham. (2004). *Iman Kristen dan Problema Sosial*. Surabaya: Momentum.
- Lasor, W. S. et.al. (1993). *Pengantar Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Lumintang, Stevri. (2006). *Misiologia Kontemporer*. Batu: Departemen Literatur PPII.
- Losco, Joseph dan Williams, Leonard. (2005). *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer, Vol. 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Losco, Joseph dan Williams, Leonard. (2005). *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer, Vol. 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lovenduski, Joni. (2008), *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. (1994). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis-Suseno, Franz. (1995). *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Jakarta: Gramedia.
- Marx, Dorothy I. (2005). *Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa*. Jakarta: Perkantas.
- Mawene, Marthinus Th. (2004). *Teologi Kemerdekaan* Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Melling, David. (2002). *Jejak Langkah Pemikiran Plato*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Nederman Cary J. and Forhan, Kate Langdon (eds.). (1993). *Medieval Political Theory – A Reader*. London and New York: Routledge.
- Octavianus, Petrus. (2004). *Menuju Indonesia Jaya (2005-2030) dan Indonesia Adidaya (2030-2055)*. Batu: Departemen Literatur YPPPII.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A. G. (1977). *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ranoh, Ayub. (1999). *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis*

- atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Rasuanto, Bur. (2005). *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Rungkat, Jimmy. (2022). Makna Kesatuan Gereja Dalam Doa Yesus Ut Omnes Unum Sint (Studi Eksegesis Yohanes 17:21-23). *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA*, 1 (2), 23-28.
- Rungkat, Jimmy. (2024). Relevansi Budaya Pendidikan Yahudi Zaman Perjanjian Lama Bagi Sistem Pendidikan Masa Kini. *Jurnal Sosial Dan Teknologi Terapan AMATA*, 4 (1), 1-12.
- Rowley, H. H. (1983). *Ibadat Israel Kuno*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Samego, Indria. (1995). "Politik Pembangunan Orde Baru: Beberapa Interpretasi Teoritik Mengenai Peran Negara dalam Mengembangkan Pengusaha Nasional", dalam *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, diedit oleh Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi. Jakarta: Gramedia.
- Singgih, Emanuel Gerrit. (2004). *Mengantisipasi Masa Depan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Sirait, Saut. (2006). *Politik Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Smith, Gary Scott. (2008). "Reformasi: Luther, Calvin, dan Kaum Anabaptis", dalam *Membangun Wawasan Dunia Kristen Vol. 2*, diedit oleh W. Andrew Hoffercker. Surabaya: Momentum.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Urban, Linwood. (2003). *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Varma, SP. (2007). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vine, W. E. (eds.). (1985). *Vine's Expository Dictionary of Biblical Words*. Nashville: Thomas Nelson.
- Vriezen, Th. C. (2001). *Agama Israel Kuno*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.